



Satuan Polisi Pamong Praja RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara
Telp / Fax (0541) 6669019 Alamat Email: satpolpp@kukarkab.go.id - Kode Pos : 75511

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : P-1087/PolPP/Set.1/000.8/08/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA ...

- KETIGA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 20 Agustus 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARFAN BOMA PRATAMA, AP
Pembina Utama Muda





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR P-
1087/PolPP/Set.1/000.8/08/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DAN RENCANA KERJA
PERUBAHAN TAHUN 2024 SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA.

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jabatan dalam Tim		Nama / NIP
Pengarah	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Ketua	:	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
Sekretaris	:	Sony Yudianto, SE NIP. 19750615 200502 1 002
Anggota	:	Imam Sukardi, SE NIP. 19810528 200701 1 014
Anggota	:	Faruk Afero NIP. 19800614 201001 1 012
Anggota	:	Asmaul Husna NIP. 19860927 201001 2 003

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 20 Agustus 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ARFAN BOMA PRATAMA, AP
Pembina Utama Muda



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja 2025 OPD Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja OPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

**Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Kartanegara**



Arfan Boma Pratama, AP
NIP. 19740621 199412 1 001



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	1
1	BAB I PENDAHULUAN	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	6
2	BAB II EVALUASI RENJAD TAHUN LALU	9
2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJAD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD	9
	<i>Tabel II.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)</i>	12
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	19
	<i>Tabel II.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja</i>	20
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD	23
2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	24
	<i>Tabel II.3 (review terhadap rancangan RKPD 2025)</i>	24
2.5	Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
	<i>Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025</i>	25
3	BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1	Telaahan terhadap kebijakan nasional	26
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja	27
	<i>Tabel III.5 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja</i>	28

4	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
4.1	Program dan Kegiatan	29
	<i>Tabel IV.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026</i>	29
5	BAB V PENUTUP	30

BAB I

pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mengemban tugas dan fungsinya kearah terselenggaranya kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, teknologi dan Sumber Daya Masyarakat, peran Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah strategis dalam mendukung jalannya pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam setiap pelaksanaan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu mengedepankan azas kemanusiaan namun tetap tegas dalam bertindak. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi terkait dan masyarakat dalam upaya menciptakan situasi yang tertib, tentram dan aman.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tersebut berupa dokumen perencanaan tahunan yang berisi tentang penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang–Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.
16. Peraturan Bupati No 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah menyediakan acuan sebagai arah kebijakan program dan kegiatan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2025, serta akan menjadi tolak ukur dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada khususnya dan kinerja Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara pada umumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja 2025 yang terdiri dari :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RenjaD, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara RenjaD dengan dokumen RKPD, RENSTA-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RenjaD.

1.4. Sistematika Penulisan

Meguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun lalu (tahun n-2/2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya.

Tabel T-C 29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tabel Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra-PD.

BAB IV RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA-PD

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026. Pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 program dan 34 kegiatan.

Berikut gambaran capaian realisasi program dan kegiatan :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
		K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp304.811.000		Rp252.351.240		82,79%	
1	1.05.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	11	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Rp520.517.394		Rp330.868.164		63,57%	
2	1.05.01.2.01.06.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja OPD	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp14.379.348.378		Rp10.787.794.564		75,02%	
3	1.05.01.2.02.01.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.988	Orang/Bulan	1.992	Orang/Bulan	100,20%	100,00%

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD		Rp32.763.600		Rp26.548.000		81,03%	
4	1.05.01.2.02.05.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	1	Laporan	1	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD		Rp175.048.000		Rp172.453.700		98,52%	
5	1.05.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	15	Laporan	15	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp260.438.000		Rp256.014.000		98,30%	
6	1.05.01.2.05.02.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp19.580.000		Rp16.038.150		81,91%	
7	1.05.01.2.05.03.01 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp120.000.000		Rp113.362.078		94,47%	
8	1.05.01.2.05.09.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	6	Orang	30,00%	100,00%
1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp23.710.066		Rp23.662.250		99,80%	
9	1.05.01.2.05.10.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	50	Orang	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah							
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp80.000.000		Rp77.928.150		97,41%	
10	1.05.01.2.06.02.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	Paket	67	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp227.172.000		Rp191.931.500		84,49%	
11	1.05.01.2.06.04.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Paket	6	Paket	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan		Rp20.011.290		Rp20.011.200		100,00%	
12	1.05.01.2.06.05.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	4	Paket	2	Paket	50,00%	100,00%
1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan OPD		Rp535.173.000		Rp503.055.516		94,00%	
13	1.05.01.2.06.09.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kosnultasi OPD	90	Laporan	126	Laporan	140,00%	100,00%

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp2.250.000.000		Rp2.063.958.000		91,73%	
14	1.05.01.2.07.02.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang telah disediakan	6	Unit	6	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp2.743.327.000		Rp2.424.010.000		88,36%	
15	1.05.01.2.07.10.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	118	Unit	84	Unit	71,19%	100,00%
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp4.015.000		Rp4.010.000		99,88%	
16	1.05.01.2.08.01.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp114.828.000		Rp93.583.920		81,50%	
17	1.05.01.2.08.02.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp38.800.000		Rp38.800.000		100,00%	
18	1.05.01.2.08.03.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp6.757.723.908		Rp6.651.315.531		98,43%	
19	1.05.01.2.08.04.03 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Rp35.000.000		Rp34.950.000		99,86%	
20	1.05.01.2.09.08.01 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	1	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp463.054.000		Rp269.320.050		58,16%	
21	1.05.01.2.09.09.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100,00%	100,00%
1.05.02.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp974.355.000		Rp834.274.660		85,62%	
22	1.05.02.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82	Unit	82	Unit	100,00%	100,00%
1.05.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum							
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							

1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Rp325.698.000		Rp315.192.000		96,77%	
23	1.05.02.2.01.01.01 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.484	Kasus	1.484	Kasus	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Rp17.478.000		Rp17.478.000		100,00%	
25	1.05.02.2.01.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp11.060.537.700		Rp9.493.733.094		85,83%	
26	1.05.02.2.01.04.01 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68	Dokumen	68	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Rp520.000.000		Rp468.798.059		90,15%	
27	1.05.02.2.01.05.01 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	148	Dokumen	148	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Rp23.483.300		Rp23.444.300		99,83%	
28	1.05.02.2.01.06.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Rp10.000.000		Rp0		0,00%	
29	1.05.02.2.01.09.01 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		Rp190.867.500		Rp166.232.800		87,09%	
30	1.05.02.2.02.01.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	8	Laporan	8	Laporan	100,00%	100,00%

1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Rp72.320.000		Rp71.216.000		98,47%	
31	1.05.02.2.02.02.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	125	Laporan	125	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Rp157.102.400		Rp111.208.500		70,79%	
32	1.05.02.2.02.03.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	125	Laporan	57	Laporan	45,60%	100,00%
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Rp170.000.000		Rp24.917.280		14,66%	
33	1.05.02.2.03.01.01 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	0	Laporan	0,00%	100,00%

2. Realisasi program/kegiatan yang tidak mernenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
		K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum							
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa		Rp50.000.000		Rp0		0,00%	
1	1.05.02.2.01.02.01 Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	4	Kasus	33,33%	80,00%

3. Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dapat memenuhi target kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, terdapat 33 kegiatan yang sesuai target dan 1 kegiatan yang tidak memenuhi target.

Dalam meningkatkan capaian kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap 3 bulan. Hasil dari monitoring ini adalah 33 kegiatan yang direncanakan berhasil dilaksanakan sesuai target.

Disamping keberhasilan tersebut, masih ada 1 kegiatan yang gagal mencapai target, penyebabnya adalah kesalahan dalam penetapan target akhir. Subkegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa adalah kegiatan yang realisasinya berdasarkan kejadian kondisional di masyarakat, sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasus yang akan terjadi.

Berdasarkan data realisasi diatas, maka tabel II.1 (T-C.29) berikut akan menggambarkan perbandingan antara evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dengan pencapaian RENSTRA OPD.

Tabel II.1 (T-C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan		Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD Tahun 2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) (akumulasi dari tahun 2021-2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)			Target program dan kegiatan (RenjaD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2024)			
								Target RENJAD tahun (2023)	Realisasi RENJAD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2		3	4	5		6	7		8=7/6	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
	Urusan Wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat														
	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	5000	angka										
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum	9610	angka	1984	Dokumen	1484	1484	Kasus	100%	1484	4952	Kasus	52%
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Presentase peningkatan gangguan trantibum	100	Persen	0	Persen	100	0	Persen	0%	0	0	Persen	0%
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	20	Kali	11	dokumen	4	0	dokumen	100%	4	15	kali	75%

4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah regu perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	125	regu	50	regu	25	25	regu	100%	25	100	Regu	80%
5	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah satpol yang bersertifikat	1000	orang	460	orang	200	0	Orang	80%	160	620	Orang	100%
6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama	25	dokumen	0	Dokumen	5	5	Dokumen	100%	5	10	Dokumen	40%
7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara	150	unit	0	Unit	30	18	Unit	60%	18	36	Unit	24%
8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP trantibum	3	dokumen	0	persen	1	1	Persen	100%	1	2	Persen	67%
9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Persentase layanan dampak penegakan perda	100	persen	0	Dokumen	100	100	Dokumen	100%	100	200	Dokumen	100%
	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah perda yang ditegakkan	14	angka										
10	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada	20	kali	0	Kali	4	4	Kali	100%	4	8	kali	100%

11	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah temuan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	500	pelanggaran	204	objek	150	150	Kasus	100%	150	504	Kasus	99%
12	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti	500	kali	95	Penegakan perda	150	0	Penegakan perda	47%	70	315	Kasus	100%
Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota		Jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota yang dibina	5	orang										
13	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikat PPNS	5	orang	1	Orang	1	1	Orang	100%	1	3	Orang	100%
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen rencana anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	130	dokumen										
14	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	55	dokumen	0	dokumen	11	11	Dokumen	100%	11	22	Dokumen	100%
15	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75	Dokumen	30	dokumen	15	15	Dokumen	86%	12	57	Laporan	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	85	dokumen										
16	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	9900	orang	1776	Orang/bulan	1980	12	Orang/bulan	67%	1338	5094	Orang	100%

17	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD	9900	orang	0	dokumen	1	1	Dokumen	100%	1	2	Dokumen	100%
18	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75	dokumen	30	dokumen	15	15	Dokumen	86%	13	58	Laporan	100%
Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian	62	dokumen										
19	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	125	stel	111	buah	1	0	buah	100%	1	112	Paket	100%
20	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	50	dokumen	11	dokumen	10	1	Dokumen	100%	10	22	Dokumen	100%
21	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	40	orang	0	orang	20	20	Orang	100%	20	40	orang	100%
22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan-undangan	250	orang										

Administrasi umum perangkat daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	30	layanan										
23	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	335	jenis	95	Rim/ buah/ kotak	67	61	Rim/ buah/ kotak	100%	67	223	Paket	100%
24	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	105	jenis	26	jenis	5	38	jenis	100%	5	69	Paket	100%
25	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan penggandaan yang disediakan	35	jenis	9	paket	7	24.340	Paket	28%	2	24.351	Paket	100%
26	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan advetorial yang disediakan	300	exemplar										
27	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi OPD yang diselenggarakan	1125	orang	254	orang	167	56	orang	80%	135	445	Laporan	100%
28	Penatausahaan arsip dinamis pada OPD	Jumlah arsip pada unit pencipta pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan	1671	Berkas	0	arsip								
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen										
29	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional kantor yang tersedia	2	unit	0	Unit								
30	pengadaan mabel	jumlah mabel kantor yang tersedia	6	unit	0	unit								
31	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang tersedia	2	paket										

32	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	24	unit	109	unit	28	0	unit	100%	28	137	Unit	18%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	60	bulan										
33	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat	60	Bulan	24	lembar	12	715	Lembar	100%	12	751	Lembar	8%
34	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	12	rekening	12	12	rekening	100%	12	36	Bulan	100%
35	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60	bulan	24	bulan	12	6	Bulan	100%	12	42	Bulan	100%
36	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor 2.penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	1.bulan 2. bulan	24	bulan	1. 12 2. 12	11	bulan	75%	1. 9 2. 9	44	bulan	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah barang milik daerah	425	unit										
37	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	405	unit	160	unit	81	78	Unit	100%	81	319	Unit	100%
38	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	10	unit	0	Unit	2	2	Unit	100%	2	4	Unit	100%
39	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	unit	4	gedung	2	2	gedung	100%	2	8	Unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat dijabarkan dalam bentuk capaian Indikator :

- 1. IKU (Kinerja Utama),
- 2. SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan
- 3. IKK (Indikator Kinerja Kunci) .

Target pada masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target IKU :

No	IKU	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kasus	1200	1100	1000	900	800
Keterangan : Kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA meningkat jika terjadi penurunan angka sebesar 100 kasus dalam setiap tahunnya melalui penindakan TIPIRING.								

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 :

No	IKU	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target 2023
1	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	Kasus	1200	1265	1100
Analisis : Target penurunan angka pelanggaran adalah 100 kasus setiap tahunnya, pada tahun 2023, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA hanya mampu melakukan tindakan TIPIRING sebanyak 35 kasus, sehingga target 100 kasus tidak tercapai. Hal disebabkan antara lain : 1. kerjasama antar instansi vertikal yaitu SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, Kejaksaan dan Kehakiman belum terjalin dengan maksimal. 2. Keterlambatan melaksanakan kegiatan yustisial TIPIRING, sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup banyak.						

2.2.2. SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Target SPM :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	100	100	100

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Tahun 2023 :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Target 2023
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	100	100
Analisis : Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA selalu mengepankan tindakan persuasif dan humanis, sehingga sepanjang tahun 2022 tidak terdapat warga negara yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil.						

2.2.3. IKK (Indikator Kinerja Kunci)

Target dan Realisasi IKK :

No	IKK Outcome	IKK Output	Target	Rumus	Realisasi	
					2023	
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan		100%	1. Jumlah Pengaduan Yang ditangani	29	100%
				2. Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk	29	
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1484		1484	
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	3090		3090	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	60		45	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1		10	

		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5		5	
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	552		552	
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan		43%	1. Jumlah Perda/Perkada yang Memuat Sanksi yang Ditegakkan	45	75%
				2. Jumlah Keseluruhan Perda Dan Perkada Yang Memuatsanksi	60	

Dalam pelaksanaan kewenangan , tugas pokok dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan ruang lingkup Pembinaan dan Pendekatan pada perorangan / kelompok masyarakat, dan Penindakan Preventive non yustisial (Surat Teguran). Dibidang Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat ruang lingkupnya meliputi Pengamanan, tempat, aset daerah, Pengerahan anggota dalam pengamanan dan pemantauan dalam penanganan unjuk rasa / demo, konflik sosial dll, Terlaksananya pengamanan (PAM) dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala masal, Terlaksananya pengakhiran dan pengamanan pejabat negara, daerah, tamu VIP, VVIP, negara, dan daerah, Penertiban, pengawasan, pengendalian dan pengamanan pemasukan pajak daerah, sumber PAD, serta objek vital daerah.

Tabel II.2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kutai Kartanegara

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13
1	jumlah pelanggaran produk hukum daerah			1300	1200	1100	1000	1300	1265	1100	1000	
4		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Capaian Tahun 2023 100% karena tidak ada warga negara yang melakukan pengaduan akibat penegakan hukum perda/perkada
5			(IKK Outcome) Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan Yang ditangani (30)
												Jumlah Pengaduan Pelanggaran Yang Masuk (30)
6			(IKK) 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum	1484	1484	1484	1849	1484	1484	1484	1849	

			dalam Kab/Kota yang ditangani									
7			2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan				0	3090				
8			3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		49	60	60	17	45	60	60	
9			4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS					5	5	10	10	
10			5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal				5	5	6	6		
							552	552	554	554		

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan. Secara umum, setiap tahun kinerja pelayanan trantibum selalu bernilai 100%, hal ini berarti Satuan Polisi Pamong Praja selalu melakukan tugasnya dengan maksimal. Akan tetapi, keberhasilan tersebut tidak menyebabkan angka pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di wilayah Kutai Kartanegara berkurang, ini berarti tugas pelayanan trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak membawa dampak yang optimal.

Beberapa hal yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain adalah mutu pelayanan trantibum anggota dalam penegakan trantibum masih rendah, sarana dan prasarana penegakan perda belum optimal, lokasi pelanggaran trantibum sulit dijangkau, kurangnya sosialisasi mengenai K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di masyarakat dan kerjasama antar Instansi terkait belum terjalin optimal.

Isu-isu strategis, tantangan dan peluang yang harus disikapi Satuan Polisi Pamong Praja untuk perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah antara lain Kutai Kartanegara memiliki 60 perda/perkada yang memuat sanksi, cakupan luas wilayah Kutai Kutai Kartanegara yang sangat besar. Antar kecamatan harus ditempuh dengan waktu sampai lebih dari dua jam, di setiap Kecamatan terdapat Seksi Trantib, akan tetapi tugas pelayanan trantibum tidak dapat dilakukan dengan maksimal karena Seksi Trantib Kecamatan hanya berfungsi secara koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, disamping itu, sangat perlu untuk melakukan analisis Pendidikan dan pelatihan yang mendukung ke arah pelayanan penegakan trantibum yang berdampak pada penurunan angka pelanggaran trantibum dan perda.

Langkah-langkah yang harus diambil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyikapi isu strategis, tantangan dan peluang tersebut adalah percepatan Langkah dan akselerasi dalam mencapai target kinerja, penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di masyarakat dan penguatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan single codebase, berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode. Disamping itu sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk pelaporan kinerja dan keuangan. sejak terbitnya Permendagri dan Kepmendagri tersebut, maka berpengaruh juga terhadap perencanaan kegiatan dan penganggaran. Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, maka program menjadi satu program utama yaitu Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Dari hasil review, melakukan beberapa perubahan pada subkegiatan baik perubahan volume maupun anggaran, antara lain sebagai berikut :

1. SubKegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengakhiran, perubahan anggaran semula Rp 325.698.000 menjadi Rp 1.628.240.000, penambahan anggaran ini karena tugas meliputi 20 kecamatan, kegiatan ini juga meliputi tugas-tugas pengakhiran dan pengamanan baik pejabat maupun acara-acara penting daerah.
2. SubKegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, perubahan anggaran semula Rp 17.478.000 menjadi Rp 100.000.000, penambahan anggaran ini karena tugas meliputi 20 kecamatan.
3. SubKegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, perubahan anggaran semula Rp 60.000.000 menjadi Rp 150.000.000, penambahan anggaran ini karena target semula hanya 1 orang, menjadi 3 orang peserta diklat PPNS.

Hasil penjabaran Program dan Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 90 tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 (Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025) berikut :

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Sebagai pengemban amanat penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki program dan kegiatan yang bersifat usulan dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB III

Tujuan dan sasaran perangkat daerah

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2025 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2021-2025 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2021-2025 sebagai berikut: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: "Kementerian Dalam Negeri mampu Menjadi poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa", dan Misi no 2 yaitu Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	43	persen	1.092.476.700	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	43%	2.038.240.000	
			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100	persen				Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%		
1	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	1100	kasus	612.186.800	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	1100	1.888.240.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kutai Kartane gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1484	kasus	325.698.000	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kutai Kartane gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1484	1.628.240.000	- Pelaksanaan Patroli di 20 kecamatan - Pengawasan Bupati dan Pejabat Penting Daerah - Penambahan jumlah personil di setiap kegiatan pengamanan
	2 1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kutai Kartane gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	kasus	50.000.000	0 1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kutai Kartane gara	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	3 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dokumen	17.478.000	0 1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2	100.000.000	
	4 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	Dokumen	75.527.500	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25	-	
	5 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	Orang	100.000.000	1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kutai Kartanegara	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	6 1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	Dokumen	23.483.300	1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24	100.000.000	kerjasama dengan 24 Instansi terkait penegakan perda
	7 1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dokumen	10.000.000	1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Satpol PP	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	-	
	8 1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	Laporan	10.000.000	1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	100	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	jumlah perda yang didegakkan	3	angka	420.289.900	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	jumlah perda yang didegakkan	3	-	
	9 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	4	Laporan	97.767.500	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	20	-	
	10 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100	Laporan	120.000.000	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150	-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
	11	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	Laporan	202.522.400		1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	100	-	
	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	1	orang	60.000.000		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	1	150.000.000	
	12	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	60.000.000		1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3	150.000.000	menambahan target menjadi 3 orang PPNS

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah	76		23.247.159.222	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	28.977.414.726	
	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	dokumen	140.000.000	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26	1.000.000.000	
	13 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah		Dokumen		1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	1	50.000.000	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR
	14 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Dokumen		1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	16	250.000.000	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR
	15 1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Berita Acara		1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31	50.000.000	penguatan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian
	16	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	dokumen	70.000.000	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	450.000.000	pergeseran 25.000.000 dari Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	17	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	70.000.000	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	50.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber
	18	1.05.01.2.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		1.05.01.2.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	150.000.000	penguatan kualitas dokumen capaian kinerja

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif		
	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		17	dokumen	15.120.160.065		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	17	17.094.051.969	
	19	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1980	dokumen	14.998.354.465		0	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1980	16.969.051.969	
	20	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	laporan	21.805.600			1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	25.000.000	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber
	21	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		15	laporan	100.000.000			1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	100.000.000	honorarium PA, Bendahara, 5 KPA, 5 Bendahara Pembantu, PP Keuangan, PP Barang
	22	1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			dokumen				1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25.000.000	Penguatan dokumen analisis prognosis

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting			
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		
	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Pengelolaan Barang Perangkat Daerah yang akuntabel			dokumen	-	1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah laporan Administrasi Pengelolaan Barang Perangkat Daerah yang akuntabel		105.000.000	
	23	1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			dokumen		1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	25.000.000	
	24	1.05.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			laporan		1.05.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	50.000.000	
	25	1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			laporan		1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor SATPOL PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting						
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi		Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif		
	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		13	dokumen	43.290.066		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja		100%	2.493.290.066		
	26	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50	Paket	160.000.000			1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50	2.430.000.000		
	27	1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		10	dokumen	19.580.000			1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		10	19.580.000		
	28	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20	Orang	20.000.000			1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20	20.000.000,00		
	29	1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50	Orang	23.710.066			1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50	23.710.066		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	layanan	205.312.900	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	606.031.500	
	30 1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	paket	80.000.000	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	200.000.000	mengakomodir kebutuhan Bidang2
	31 1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	paket	44.600.000	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	100.000.000	Penyesuaian dengan Kebutuhan dan kenaikan biaya
	32 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	paket	6.031.500	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. KUKAR	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	6.031.500	Penyesuaian dengan Kebutuhan dan kenaikan biaya
	1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dokumen	9.216.400	1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. KUKAR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	-	
	33 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225	laporan	65.465.000	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225	300.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	7.285.987.192	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	7.095.987.192	
	34 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	4.015.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.015.000	
	35 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	100.000.000	
	36 1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	laporan	25.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	25.000.000	
	37 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	7.156.972.192	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	6.966.972.192	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	22%	unit	452.409.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP		Jumlah Barang Milik Daerah	21,87%	98.053.999	
	38 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	unit	354.355.000	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor SATPOL PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	-	Kenaikan Harga BBM, Sparepart dan Pajak
	39 1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kantor SATPOL PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	unit	20.000.000	1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kantor SATPOL PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	20.000.000	
	40 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	78.054.000	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor SATPOL PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	78.053.999	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor SATPOL PP	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	persen	90.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	590.000.000	
	41 1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	unit	90.000.000	1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	90.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	42	1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	250.000.000	1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	250.000.000		
	43	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	250.000.000	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. KUKAR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	250.000.000		
							24.339.635.922						31.015.654.726	

Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, sebagai pelaksana dilapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor: 6 tahun 2010 Bab III pasal 6. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 88 tahun 2012, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Isu strategis dalam Renstra 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja adalah pemenuhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih berorientasi pada hasil dan dampak. Sehingga dengan target tersebut, ketentraman, ketertiban dan keindahan dapat diwujudkan di Kutai Kartanegara.

Arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyikapi isu strategis tersebut adalah percepatan Langkah dan akselerasi dalam mencapai target kinerja, penguatan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di masyarakat dan penguatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel III.5
 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	melaksanakan penegakan perda/perkada (tipiring) bekerjasama dengan Instansi terkait (TNI POLRI KEJAKSAAN KEHAKIMAN)	melaksanakan penegakan perda/perkada melalui proses penyidikan dan penyelidikan dengan memberdayakan PPNS sampai ke tahap persidangan tipiring
					melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Perda dan Perkada
				Melaksanakan patroli dan deteksi dini	melaksanakan pengawasan pelanggaran perda dan perkada
					membentuk regu-regu kesiap-siagaan dini.
				Melaksanakan peingkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Membuat aplikasi layanan Satuan Polisi Pamong Praja siaga
					melaksanakan diklat mengenai penegakan perda secara berkala

BAB IV

rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

4.1. Program dan Kegiatan

Visi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 **"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"**. Selanjutnya Visi dan misi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Misi pertama adalah, **"Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani"**, dengan **Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)**, merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Pada perencanaan untuk tahun 2025, sesuai dengan hasil analisa kebutuhan, maka Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 2 program, 11 kegiatan dan 52 subkegiatan. Sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap penegakan perda, maka kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat juga bersentuhan dengan tugas pokok itu sendiri seperti penertiban jalur hijau serta jalan utama dari PKL di kecamatan tenggarong, loa kulu dan loa janan, penegakan perda seperti perda KTP, Perda Miras dan Perda Prostitusi di wilayah Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Kota Bangun dan Tenggarong Seberang. Juga terdapat penertiban Perijinan baik itu IMB maupun ijin usaha yang terfokus di kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang, Muara Jawa, Samboja dan Sanga-Sanga. Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan patroli rutin di seluruh wilayah Kutai Kartanegara untuk menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan (K3). Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai ketertiban, keamanan dan keindahan (K3) serta penanggulangan bencana.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Tahun anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan 2 program, 11 Kegiatan dan 52 Subkegiatan dengan pagu sebesar Rp 31.145.654.726,-.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Beberapa subkegiatan tersebut, terutama yang berhubungan dengan tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja, mengalami kenaikan pagu seperti :

- 3.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, dari pagu 325.698.000 menjadi 1.628.240.000, hal ini karena luasnya cakupan ruang lingkup kegiatan yang meliputi Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
- 3.2. Penambahan subkegiatan baru di kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 3.3. Penambahan Kegiatan baru yaitu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD, Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah OPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada OPD.

4. Tabel Rencana program dan kegiatan

Berikut disajikan tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		43	persen	2.038.240.000			43	persen	1.082.476.700
			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)		100	persen				100	persen	
1	I	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum		1100	kasus	1.888.240.000	APBD		1100	kasus	602.186.800
		1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kutai Kartanegara	1484	kasus	1.628.240.000	APBD	- Pelaksanaan Patroli di 20 kecamatan - Pengawasan Bupati dan Pejabat Penting Daerah - Penambahan jumlah personil di setiap kegiatan pengamanan	1484	kasus	325.698.000
		1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kutai Kartanegara	12	kasus	50.000.000	APBD		12	kasus	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	
		1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kutai Kartanegara	2	Dokumen	100.000.000	APBD		4	Dokumen	17.478.000	
		1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kutai Kartanegara	25	Dokumen	-	APBD		25	Dokumen	75.527.500	
		1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kutai Kartanegara	200	Orang	-	APBD		200	Orang	100.000.000	
		1.05.02.2.01.06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kutai Kartanegara	24	Dokumen	100.000.000	APBD		kerjasama dengan 24 Instansi terkait penegakan perda	5	Dokumen	23.483.300
		1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Satpol PP	1	Dokumen	-	APBD		1	Dokumen	-	
		1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Satpol PP	100	Laporan	10.000.000	APBD		100	Laporan	10.000.000	
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan		jumlah perda yang ditegakkan	Kab Kukar	3	angka	-	APBD		3	angka	420.289.900		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10
		1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kab Kukar	20	Laporan	-	APBD	sosialisasi perda dilaksanakan di 20 kecamatan	4	Laporan	97.767.500
		1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Kukar	150	Laporan	-	APBD	penambahan honor anggota Cipkon	100	Laporan	120.000.000
		1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kab Kukar	100	Laporan	-	APBD	Penambahan Honor Tim Tipiring, penambahan SPPD	100	Laporan	202.522.400
		1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina		1	orang	150.000.000	APBD		1	orang	60.000.000
		1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kantor SATPOL PP	3	Laporan	150.000.000	APBD	menambahkan target menjadi 3 orang PPNS	1	Laporan	60.000.000
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		nilai SAKIP Perangkat Daerah		76		29.107.414.726			76		23.509.652.756
		1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26	dokumen	1.000.000.000	APBD		26	dokumen	620.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	
		1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Kantor SATPOL PP	1	Dokumen	50.000.000	APBD	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR		1	Dokumen	50.000.000
		1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	16	Dokumen	250.000.000	APBD	penguatan pelaksanaan satudata KUKAR		16	Dokumen	230.000.000
		1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	31	Berita Acara	50.000.000	APBD	penguatan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		31	Berita Acara	50.000.000
		1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	11	dokumen	450.000.000	APBD	pergeseran 25.000.000 dari Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		11	dokumen	70.000.000
		1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor SATPOL PP	15	laporan	50.000.000	APBD	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber		15	laporan	70.000.000
		1.05.01.2.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor SATPOL PP	1	laporan	150.000.000,00	APBD	penguatan kualitas dokumen capaian kinerja		1	laporan	150.000.000,00
		1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		17	dokumen	17.119.051.969	APBD		17	dokumen	15.145.160.065	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		6	7	8	9		10
		1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor SATPOL PP	1980	dokumen	16.969.051.969	APBD		1980	dokumen	14.998.354.465
		1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor SATPOL PP	1	laporan	25.000.000	APBD	bertambahnya data-data dan aplikasi yang harus dilengkapi, sehingga perlu penambahan rapat-rapat baik internal dan mengundang narasumber	1	laporan	21.805.600
		1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Kantor SATPOL PP	15	laporan	100.000.000	APBD	honorarium PA, Bendahara, 5 KPA, 5 Bendahara Pembantu, PP Keuangan, PP Barang	15	laporan	100.000.000
		1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor SATPOL PP	1	dokumen	25.000.000	APBD	Penguatan dokumen analisis prognosis	1	dokumen	25.000.000
		1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					105.000.000					
		1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	1	dokumen	25.000.000	APBD		1	dokumen	25.000.000
		1.05.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor SATPOL PP	1	laporan	50.000.000	APBD		1	laporan	50.000.000
		1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor SATPOL PP	1	laporan	30.000.000	APBD		1	laporan	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10
		1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		100%	dokumen	2.493.290.066	APBD		13	dokumen	63.290.066
		1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		50	Paket	2.430.000.000	APBD		50	Paket	160.000.000
		1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor SATPOL PP	10	dokumen	19.580.000	APBD		10	dokumen	19.580.000
		1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20.000.000					20.000.000
		1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor SATPOL PP	50	Orang	23.710.066	APBD		50	Orang	23.710.066
		1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	layanan	606.031.500	APBD		6	layanan	196.096.500
		1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	67	paket	200.000.000	APBD		67	paket	80.000.000
		1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	21	paket	100.000.000	APBD		21	paket	44.600.000
		1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. KUKAR	7	paket	6.031.500	APBD		7	paket	6.031.500
		1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		225	laporan	300.000.000	APBD		225	laporan	65.465.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		6	7	8	9		10
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		8	dokumen	-	APBD	Dengan memperhatikan tingkat urgensi, kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD yang sempat dihilangkan dalam 2 tahun anggaran, diusulkan kembali di APBD Perubahan TA 2024. Adapun usulan besaran dananya sbb:		dokumen	
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	bulan	7.095.987.192	APBD		12	bulan	7.095.987.192
		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	laporan	4.015.000	APBD		12	laporan	4.015.000
		1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. KUKAR	12	laporan	100.000.000	APBD		12	laporan	100.000.000
		1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. KUKAR	12	laporan	25.000.000	APBD		12	laporan	25.000.000
		1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	laporan	6.966.972.192	APBD		12	laporan	6.966.972.192
	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Jumlah Barang Milik Daerah		21,87%	unit	98.053.999	APBD		22%	unit	452.408.999
		1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor SATPOL PP	81	unit	-	APBD	Kenaikan Harga BBM, Sparepart dan Pajak	81	unit	354.355.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10
		1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kantor SATPOL PP	1	unit	20.000.000	APBD	Penyesuaian biaya sewa webhosting (sesuai pembayaran webhosting tahun 2022)	2	unit	20.000.000
		1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor SATPOL PP	2	unit	78.053.999	APBD	Dengan jumlah pagu awal yang tersedia (Rp. 78.054.000), masih dirasa belum mencukupi pmbiayaan. Oleh karena itu diperlukan tambahan anggaran Rp. 45.000.000 untuk biaya pengerjaan.	2	unit	78.053.999
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kantor SATPOL PP	100	persen	590.000.000	APBD		100	persen	250.000.000
		1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					250.000.000	APBD				250.000.000
		1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel					-					
		1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					250.000.000					
		1.05.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud					-					
		1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. KUKAR	99	unit	90.000.000	APBD	Pengadaan Peralatan KORSIK (1,600,000,000) + Peralatan Video Editing (100,000,000)	99	unit	90.000.000
31.145.654.726												

BAB V

penutup

Rencana Kerja 2025 disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Produk hukum daerah, serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rencana Kerja 2025 ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2021 - 2026.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya penyusunan terhadap Renstra Tahun 2025-2029.
3. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

1. Seluruh bidang dan seksi di dalam tubuh Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program– program Rencana Kerja Tahun 2025 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi juga memuat rancangan kerangka Pelayanan Publik yang membawa dampak penurunan angka pelanggaran trantibum di masyarakat.
3. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran 2025.

c. Rencana tindak lanjut

Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya.
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur Satuan Polisi Pamong Praja agar Renja 2025 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur SATPOL PP.

4. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.

Meskipun Rencana Kerja 2025 ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja 2025 ini. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Rencana Kerja 2025 ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Sehingga Visi visi dan misi RPJMD Kab.Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 ***"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"*** dapat tercapai.

Tenggarong, 15 Agustus 2024
Satuan Polisi Pamong Praja
Kepala Satuan



Arfan Boma Pratama, AP
19740621 19941 1 001